Mengembalikan Kejayaan Jelutung di Hutan Gambut

Oleh Dri Handoyo, Dinas Kehutanan Tanjung Jabung Barat

Kemana jelutung-jelutung tersebut menghilang? Jelutung, tanaman bergetah yang menjadi sumber bahan baku untuk permen karet, pernah menjadi hasil hutan non kayu yang cukup penting bagi sebagian masyarakat di Tanjung Jabung Barat. Tanaman ini pernah menjadi sumber penghidupan masyarakat pada sekitar tahun 1990, namun secara perlahan berangsur menghilang tak berjejak. Tulisan ini merupakan gambaran perjuangan Dinas Kehutanan Tanjung Jabung Barat dalam upaya mengembalikan lagi kejayaan jelutung.

Tanjung Jabung Barat merupakan sebuah kabupaten dari pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung. Dengan luas wilayah daratan 5.009,82 Km², lebih dari sepertiganya merupakan areal rawa gambut. Wilayah yang saat ini merupakan areal penggunaan lain dimanfaatkan masyarakat untuk budi daya pertanian dan perkebunan, sementara yang termasuk areal hutan produksi dimanfaatkan untuk hutan tanaman industri (HTI) pulp.

Konon, sebelum menjadi wilayah pertanian dan HTI, daerah ini merupakan areal hutan alam yang di dominasi tanaman jelutung rawa alam (*Dyera lowii*). Masyarakat Desa Senyerang, Bram Itam Kanan, Bram Itam Kiri, Serdang Jaya dan Mekar Jaya sempat merasakan nikmatnya hasil getah jelutung yang disadap di hutan. Namun sekarang, sudah tidak ada lagi pohon jelutung, bahkan sudah tidak ditemukan lagi pengumpul getah jelutung.

Pohon jelutung yang tersisa hanyalah di kawasan hutan lindung gambut yang itupun sudah sangat sedikit jumlahnya. Kawasan hutan lindung seluas 15.965 Ha ini telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Sungai Bram Hitam. Namun demikian, kondisi areal yang merupakan eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) saat ini cukup memprihatinkan. Perambahan dan pembalakan dilakukan oleh sebagian oknum masyarakat, dan saat ini sekitar lebih 4.624 Ha telah beralih fungsi menjadi kebun sawit, pinang dan kopi.



Sisa pohon jelutung yang masid ada di Perkebunan Kelapa Sawit | foto: Atiek Widayati

Membangun kesepakatan dengan masyarakat

Konflik dengan masyarakat sempat terjadi saat membangun kesepakatan pengelolaan hutan lindung gambut. Dengan difasilitasi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebuah kesepakatan pun terbentuk dimana hutan lindung gambut yang merupakan kawasan hutan negara harus tetap dipertahankan kondisi alaminya dengan catatan masyarakat tetap dilibatkan dalam pengelolaannya. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dirasa merupakan satu pola pengelolaan yang cukup kondusif bagi dinas kehutanan setempat untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang terjadi.

Dalam skema ini, jelutung ditanam diantara tanaman perkebunan yang dikelola masyarakat. Bibit jelutung dan seluruh biaya penanaman ditanggung oleh pemerintah melalui Dinas Kehutanan setempat. Masyarakat diharapkan dapat merawat, memelihara dan mengamankan tanaman jelutung dan mendapatkan hak atas tanaman ini melalui sistem bagi hasil. Tanaman perkebunan masih dapat diusahakan selama satu daur dengan hasil sepenuhnya untuk masyarakat.

Tahun 2009, penanaman pohon jelutung rawa di areal hutan lindung gambut oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai dilaksanakan. Penanaman pertama dilaksanakan di wilayah Bram Hitam





Kanan (Parit Selebes, Sejahtera, Patiro, Jawa Bugis, Bone dan Bekawan) seluas 500 Ha. Jelutung di tanam diantara tanaman sawit berumur 1 – 4 tahun, tepatnya pada inter cropping atau titik mata lima tanaman dimaksud. Pengukuran dan pengamatan tim Dinas Kehutanan terhadap 509 pohon yang berumur 11 bulan, menunjukkan tinggi rata-rata pohon jelutung mencapai 111,29 cm dan diameter batang 2,67 cm.

Di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara, tepatnya di Parit Tomo, Parit Lapis Tomo dan Parit Panglong, jelutung ditanam sekitar tahun 2010. Pengukuran terhadap 151 batang berumur 5 bulan tinggi rata-rata mencapai 32,56 cm dan keliling batang rata-rata 2,04 cm. Pelaksanaan kegiatan untuk 2011 direncanakan di Parit Jelutung, Parit Mutiara 1, Parit Mutiara 2, Parit Pemuda dan Parit Tawakal termasuk wilayah administrasi Kelurahan Bram Hitam Kiri Kecamatan Bram Hitam.

Jelutung juga dikembangkan di lahan masyarakat dalam bentuk kelompok. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Kehutanan telah membantu kurang lebih 60 Ha yang meliputi kawasan Desa Senyerang (Parit Ujung Mursit dan Parit Cikpah). Sebelumnya, kelompok yang dibantu pemerintah ini, kelompok Rimba Lestari, secara swadaya telah melakukan pengembangan jelutung di lahan mereka sendiri. Bibitnya berasal dari pohon induk yang mereka pelihara. Pohon induk ini telah mendapatkan sertifikasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Palembang dengan kategori Pohon Benih Teridentifikasi.

Mengapa harus jelutung?

Jelutung rawa atau Dyera Lowii tumbuh dengan baik di tanah organosol dengan curah hujan tipe A dan B. Menurut klasifikasi iklim Oldeman, kategori A memiliki bulan basah lebih dari 9 kali berturut-turut dan tipe B memiliki bulan basah 7 hingga 9 kali berturut-turut. Jenis ini tersebar di Wilayah Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dengan bentuk batang silindris tanpa banir, pohon ini dapat mencapai tinggi 60 meter dengan diameter 260 cm dan batang bebas cabang setinggi 30 meter. Pola cabangnya tidak terlalu rapat. Sebagai tanaman endemik, penanaman jelutung tidak memerlukan manipulasi lahan yang terlalu tinggi karena telah tumbuh dan berkembang secara alami.

Tekstur kayu jelutung halus, warna putih dan serat yang searah. Kayu ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri *plywood*, pensil, mainan dan moulding. Getahnya merupakan bahan baku permen karet, dll. Dari hasil penelitian Mamat Rahmat dan Bastoni (2007), jelutung dapat disadap pada umur 10 tahun. Studi tersebut juga menunjukkan bawah getah yang dihasilkan sekira 0,36 Kg/pohon dengan interval waktu sadap 7. Informasi dari masyarakat setempat, interval waktu sadap yang mereka terapkan umumnya 3 hari. Jarak antar pohon yang disadap tidak terlalu jauh, dengan pertimbangan kemampuan jelajah si penyadap. Apabila di asumsikan penyadapan getah dalam satu bulan 10 kali, setiap pohonnya dapat menghasilkan getah 3,6 Kg.

Dalam praktek budidaya tanaman jelutung intensif, jarak tanam yang disarankan 5 x 5 meter dengan rata-rata pohon per hektarnya sekira 400 batang. Jumlah pohon yang hidup sampai siap sadap diperkirakan sekitar 80%. Dengan asumsi hasil per batang 3 kg/bulan dan harga getah jelutung sekira Rp 6.500,- per kg, petani bisa memperoleh hasil sebesar Rp 6.240.000,- per bulan.

Kayunya dapat dipanen setelah pohon tidak mampu menghasilkan getah. Kayu jelutung memiliki kualitas dan harga setara dengan kayu meranti. Apabila



diasumsikan volume kayu perbatang rata-rata 2 m³, setiap hektar diperoleh kayu bulat sebanyak 320 batang, maka produksinya sebesar 640 m³/ha. Dengan demikian petani juga akan memperoleh penghasilan dari penjualan kayu yang dapat digunakan modal untuk penanaman kembali.

Secara sosial, budidaya pohon jelutung mulai dari tanam, pelihara dan panen getah dapat menyerap tenaga kerja. Melalui perluasan lapangan kerja ini, kesejahteraan dapat meningkat dan masyarakat menyadari fungsi hutan secara nyata. Dengan demikian mereka akan menjaga hutan mereka. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap hutan karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan menyebabkan terjadinya perambahan dan pembalakan. Terlebih lagi, masyarakat merasa tertekan karena akses mereka dibatasi oleh laranganlarangan. Dengan demikian mulai dirasa perlu untuk mengubah image petugas yang berwenang yang hanya bisa membuat larangan tapi mulai melibatkan masyarakat mengelola hutan sehingga ikut merasa memiliki dan menikmati fungsi hutan. Jika rasa memiliki dan menyadari fungsi dan manfaat hutan timbul, tanpa perlu komando dari para pemangku kepentingan, masyarakat akan dengan sendirinya melindungi dan mengamankan hutan.

Kendala dan upaya mencari solusi

Upaya rehabilitasi hutan lindung gambut sebagai areal tangkapan air berlangsung bukannya tanpa perlawanan. Masyarakat yang merasa telah mengelola areal tersebut menolak dan merasa pemerintah akan mengambil haknya begitu saja. Sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa jelutung tidak dapat menjanjikan. Namun demikian, Dinas tetap berupaya melakukan pendekatan dengan membangun mediasi yang netral melalui lembaga masyarakat yang kredibel. Disamping itu, pendampingan yang kuat terhadap masyarakat dan institusi lokal terus dilakukan untuk mendorong upaya pemulihan fungsi kawasan.

Ancaman terhadap kawasan hutan lindung gambut Sungai Bram Hitam cukup tinggi. Bagian timur dan utara berbatasan langsung dengan pemukiman dan lahan masyarakat, dapat ditempuh lewat darat maupun sungai bram itam kanan dan kiri yang membelah kawasan ini. Selain itu, tidak adanya organisasi kemasyarakatan di tingkat desa juga menjadi kendala. Pemerintah mengharapkan dengan terbentuknya KPHL Model Sungai Bram Hitam, organisasi tingkat tapak dapat terbentuk sehingga dapat mengurangi ancaman dan gangguan hutan dan

membantu memperkecil celah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun karena keterbatasan SDM, organisasi ini belum dapat terbentuk. Sumber dana pembangunan, status serta bentuk organisasinya juga belum ditetapkan.

Nota kesepakatan yang dibuat bersama masyarakat masih dalam bentuk perjanjian. Karena itu, PERDA perlu segera disusun sehingga masyarakat mempunyai legalitas formal yang lebih kuat. Maka dari itu dinas kehutanan bersama-sama dengan instansi terkait agar mendorong segera terbentuknya Perda yang mengatur tentang pengelolan hutan bersama masyarakat.

Tantangan yang lebih berat adalah belum adanya pasar getah jelutung. Meski dulu pernah ada, namun karena produksi jelutung di Tanjung jabung barat terhenti, maka pasarpun ikut menghilang. Maka dari itu pemerintah dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat membuka peluang pasar, misalnya dengan mencari investor pasar atau mendirikan pabrik/industri pengolahan getah jelutung. Masih panjang perjuangan ini... dan janganlah berhenti sampai disini.

*Penulis adalah Kepala Seksi Perundangundangan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi.